

INTISARI

Pada tahun 2021 Bupati Sumenep mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) untuk menjadikan Kabupaten Sumenep salah satu kota cerdas yang mampu menjadikan Desa menjadi cerdas dan terintegrasi. Kebijakan tersebut lebih ke dimensi *smart governance*, dengan melalui sebuah *website* Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) yang di implementasikan di seluruh Desa di Kabupaten Sumenep. Salah satu Desa yang diharapkan mampu untuk mengimplementasikan *smart governance* adalah Desa Pinggirpapas serta Desa Pinggirpapas merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Namun terdapat masalah, yakni kondisi masyarakat Desa Pinggirpapas yang berbeda dengan daerah lain. Desa Pinggirpapas memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak namun masyarakat Desa Pinggirpapas memiliki tingkat pendidikan yang minim dan pekerjaan yang kurang baik. Serta tingkat pemahaman terhadap teknologi informasi yang kurang baik. Dari permasalahan tersebut menumbuhkan sebuah pertanyaan bagaimana analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi Desa di Kabupaten Sumenep, yang bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi kebijakan *smart governance* dalam mewujudkan data terintegrasi Desa di Desa Pinggirpapas. Permasalahan dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teori analisis implementasi menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (Duadji, 2017), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dihasilkan bahwa, informasi terkait *smart governance* belum tersampaikan ke masyarakat dan belum ada pengembangan yang dilakukan, Namun sudah memiliki sumber daya yang cukup baik meskipun kualitas SDM masih kurang, serta respon dan komitmen para pelaksana di Desa Pinggirpapas cukup bagus untuk mendukung implementasi *smart governance*. Akan tetapi, komunikasi, pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinggirpapas kurang baik dan maksimal. Keahlian para pelaksana kurang baik dan kontrol yang dilakukan oleh Kepala Desa Pinggirpapas masih kurang maksimal. Serta masyarakat tidak terlibat dalam implementasi *smart governance* di Desa pinggirpapas, berbagai pemetaan terkait pengintegrasian data Desa dan program *smart governance* masih kurang maksimal.

Kata kunci: *Smart village*, *Smart governance*, Teknologi informasi dan komunikasi, Integrasi data Desa.

ABSTRACT

In 2021 the Sumenep Regent issued a policy, namely Sumenep Regent Regulation Number 44 of 2021 concerning Village Information Systems Data Integration of Empowered Village (DIGDAYA) to make Sumenep Regency one of the smart cities capable of making the village smart and integrated. This policy is more into the dimension of smart governance, through a website Data Integration of Empowered Village (DIGDAYA) which is implemented in all village in Sumenep Regency. One of the village that is expected to be able to implement smart governance is Pinggirpapas Village and Pinggirpapas Village is a village that has the population is quite large. However, theret is a problem, namely the condition of the people of Pinggirpapas Village, which is different from other regions. Pinggirpapas Village has a fairly large population, but the people of Pinggirpapas Village have a minimal level of education and jobs that are not good. As well as a poor level of understanding of information technology. From these problems raises a question how to analyze the implementation of smart governance policies in realizing integrated village data in districts Sumenep, Which aims to find out the analysis of the implementation of smart governance policies in realizing village integrated data in Pinggirpapas Village. The problems research were analyzed using implementation analysis theory according to Donald Van Meter & Carl Van Horn (Duadji, 2017), using qualitative research methods. It resulted that, information related to smart governance has not been conveyed to the public and no development has been carried out. However, they already have good enough resources even though the quality of human resources ebeb through the quality of resources nad commitment of the implementers in Pinggirpapas Village is good enough to support the implementation of smart governance. The implementers were not good and the control exercised by the Head og Pinggirpapas Village was still not optimal. As well as the community was not involved in the implementation of smart governance in the Pinggirpapas Village, various mappings related to interesting Village data and the smart governance program were still not optimal.

Keywords: *Smart village, Smart governance, Information and communication technology, Village data integration.*